

ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH UNTUK ARAHAN PEMBANGUNAN KECAMATAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN GARUT

(Regional Economic Growth Analysis as Direction to Coastal Regional Development in Garut Regency)

Dudu Sudarya¹, Santun R.P. Sitorus² dan Muhammad Firdaus³

¹ Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB.

²Fakultas Pertanian (FAPERTA), IPB.

³Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), IPB.

Jl. Meranti, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680.

E-mail: dudusudarya@gmail.com.

Diterima (received): 16 September 2013; Direvisi (revised): 18 Oktober 2013; Disetujui dipublikasikan (accepted): 21 November 2013

ABSTRAK

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir Kabupaten Garut, perlu dilakukan penelitian terhadap potensi dan karakteristik ekonomi wilayah untuk merumuskan strategi pembangunan yang efektif. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui tingkat perkembangan ekonomi wilayah di kecamatan pesisir; (2) mengetahui sektor ekonomi unggulan; (3) mengetahui hirarki dan efisiensi wilayah pembangunan; dan (4) merumuskan arahan wilayah pembangunan dan sektor ekonomi di kecamatan pesisir. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Entropi, Analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share Analysis* (SSA), Analisis Skalogram, *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan Analisis MCDM-TOPSIS. Hasil analisis memperlihatkan bahwa tingkat keberagaman dan keberimbangan sektor-sektor ekonomi di kecamatan wilayah pesisir masih rendah dengan tingkat perkembangan sebesar 72% dari total kemampuan maksimumnya. Wilayah pesisir Kabupaten Garut memiliki ekonomi basis di sektor primer yaitu pertanian. Sedangkan sektor sekunder adalah sektor yang tumbuh paling cepat terutama di sektor industri pengolahan. Analisis hirarki terhadap sarana prasarana ekonomi desa menunjukkan bahwa hanya ada 3 desa atau sekitar 4,6% yang masuk Hirarki I sebagai inti wilayah dan pusat pertumbuhan. Sebanyak 20 desa atau 33,8% adalah wilayah Hirarki II dan 40 desa atau 61,5% adalah wilayah Hirarki III. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk meningkatkan perkembangan dan pemerataan ekonomi, prioritas pembangunan diarahkan pada Kecamatan Mekarmukti, Pakenjeng dan Caringin. Terdapat 25 desa di wilayah pesisir diarahkan untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan 40 desa diarahkan sebagai wilayah pendukung atau *hinterland*. Prioritas pembangunan sektor ekonomi terutama diarahkan untuk sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor gas, listrik dan air minum.

Kata Kunci: Kabupaten Garut, pertumbuhan ekonomi, perkembangan wilayah, wilayah pesisir

ABSTRACT

In order to strengthen economic growth in coastal areas of Garut Regency, it is necessary to study characteristics of the region's economic potential and formulate the direction of development. The aims of this research were: (1) to determine the level of regional economic growth in the coastal districts, (2) to determine the leading sectors of economic, (3) to determine hierarchy and efficiency of development, and (4) to formulate direction of regional and economic development. The analytical methods used were Regional Entropy Analysis, Location Quotient (LQ) Analysis, Shift Share Analysis (SSA), Schallogram Analysis, Data Envelopment Analysis (DEA) and the MCDM-TOPSIS Analysis. The results showed that the rate of economic growth in coastal areas was 72 % of its maximum capacity. The basis of economic sectors of coastal areas in Garut regency is mainly in the primary sectors of agriculture. Secondary sector was the fastest growing sector especially in manufacturing. Hierarchy analysis of rural economic facilities showed that there were only 3 villages or approximately 4.6 % belongs to Hierarchy I as core areas and growth centers. 20 villages or 33.8 % belongs to Hierarchy II and 40 villages or 61.5 % belongs to Hierarchy III. The priority of development areas to push economic growth and equity directed to districts of Mekarmukti, Pakenjeng and Caringin. There are 25 villages directed for developing economic growth centers and 40 villages for hinterland areas. The economic developments were directed to agriculture, manufacturing, trading, hotels and restaurants, electricity, gas and water sectors.

Keywords: Garut Regency, economic growth, regional development, coastal areas

PENDAHULUAN

Sebagai wilayah yang sedang tumbuh dan berkembang, pembangunan Kabupaten Garut masih banyak terkendala karena terbatasnya

informasi tentang perkembangan setiap sub-wilayah. Perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya didasarkan pada kajian yang komprehensif serta masih dijalankannya konsep pembangunan yang bersifat sektoral cenderung

menciptakan pertumbuhan yang tidak seimbang yang menyebabkan disparitas perkembangan antar wilayah. Secara faktual, fenomena ini tampak pada perkembangan kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir.

Berdasarkan hasil penelitian Gumilar (2009), dalam kurun waktu tahun 2001-2007, tingkat disparitas wilayah di Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Williamson dari sebesar 0,2628 pada Tahun 2001 menjadi 0,4154 pada Tahun 2007. Kecamatan-kecamatan di wilayah Pengembangan Garut Utara merupakan wilayah yang relatif berimbang dengan nilai disparitas paling rendah. Sementara kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir yang berada di Wilayah Pengembangan Garut Selatan merupakan wilayah yang relatif tertinggal dan mengalami peningkatan disparitas pembangunan paling tinggi. Hal ini terlihat dari peningkatan Indeks Williamson dari 0,2864 pada Tahun 2001 menjadi 0,3075 pada Tahun 2007.

Kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir sebenarnya memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian wilayah-wilayah di sekitarnya. Menurut Rustiadi (2003), secara alamiah kawasan pesisir pada dasarnya bukan semata-mata merupakan kawasan peralihan ekosistem daratan dan laut, namun sekaligus merupakan titik temu antara aktifitas ekonomi masyarakat berbasis daratan dan lautan. Nilai strategis wilayah pesisir Kabupaten Garut dapat dilihat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Perda No. 29 Tahun 2011) dimana wilayah pesisir Kabupaten Garut ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang dianggap memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten.

Penetapan kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir sebagai kawasan ekonomi strategis merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan strategi perencanaan yang matang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh sebab itu, diperlukan suatu penelitian untuk menganalisis potensi dan tingkat perkembangan ekonomi wilayah. Hal ini sejalan dengan pendapat Morrissey dan O'Donoghue, (2012) bahwa analisis ekonomi wilayah penting dilakukan untuk menyediakan akses bagi pemegang kebijakan terkait dampak sektor ekonomi. Analisis juga bisa digunakan untuk memastikan keberlanjutan sektor secara ekonomi dan lingkungan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui tingkat perkembangan ekonomi wilayah di kecamatan pesisir; (2) mengetahui sektor ekonomi

unggulan; (3) mengetahui hirarki dan efisiensi wilayah; dan (4) merumuskan arahan pembangunan wilayah dan sektor ekonomi kecamatan pesisir.

METODE

Penelitian dilakukan di 7 kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Garut pada Bulan April-Oktober 2013. Jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi: (1) Data Potensi Desa (PODES) Kecamatan Pesisir Tahun 2011; (2) Data PDRB 42 Kecamatan di Kab. Garut Tahun 2007, (3) Data PDRB kecamatan di wilayah pesisir Tahun 2001 dan 2008, (4) Data luas wilayah, jumlah penduduk, pemanfaatan lahan dan serapan tenaga kerja per-sektor tiap Kecamatan Tahun 2011; dan (5) Peta Administratif Wilayah. Data primer yang digunakan adalah data preferensi responden. Alat analisis yang digunakan adalah *software* pengolah data (*Excell*, *SANNA* dan *Win4DEAP*) serta *software* pengolah peta.

Perkembangan suatu wilayah dapat ditunjukkan dari semakin meningkatnya komponen wilayah dan semakin luasnya hubungan yang dapat dijalin antara subwilayah-subwilayah dalam sistem tersebut maupun dengan sistem sekitarnya. Perluasan jumlah komponen aktifitas ini dapat dianalisis dengan menghitung indeks diversifikasi dengan konsep *entropy* (Panuju dan Rustiadi, 2012). Formula umum Entropi seperti dinyatakan pada **Persamaan 1**. Sedangkan keunggulan komparatif wilayah didekati melalui analisis *Location Quotient* (LQ). Metode LQ dirumuskan oleh **Persamaan 2**. Keunggulan kompetitif wilayah didekati dengan analisis *Shift Share Analysis* (SSA). SSA dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor yang paling pesat tumbuh atau paling lambat (Bowen, 2012). Analisis SSA menggunakan **Persamaan 3**.

$$S = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n P_{ij} \ln P_{ij} \dots\dots\dots(1)$$

dimana :

- P_{ij} = nilai rasio frekuensi kejadian pada kategori ke-i di sub wilayah ke-j
- I = kategori aktivitas ekonomi ke-i
- j = kategori wilayah ke-j
- n = total kategori i dan j

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij} / X_i}{X_{.j} / X_{..}} \dots\dots\dots(2)$$

dimana :

- LQ_{ij}= Indeks kuosien lokasi sub-wilayah i untuk sektor j.
- X_{ij} = PDRB masing-masing sektor j di sub-wilayah i.
- X_i = PDRB total di sub-wilayah i.

X_j = PDRB total sektor j di wilayah.
 $X_{..}$ = PDRB total seluruh sektor di wilayah

$$SSA = \left(\frac{X_{..(t1)}}{X_{..(t0)}} - 1 \right) + \left(\frac{X_{.j(t1)}}{X_{.j(t0)}} - \frac{X_{..(t1)}}{X_{..(t0)}} \right) + \left(\frac{X_{ij(t1)}}{X_{ij(t0)}} - \frac{X_{.j(t1)}}{X_{.j(t0)}} \right) \dots\dots(3)$$

dimana :
 a = komponen *share*
 b = komponen *proportional shift*
 c = komponen *differential shift*
 $X_{..}$ = nilai total aktivitas dalam total wilayah
 $X_{.j}$ = nilai total aktivitas tertentu dalam total wilayah
 X_{ij} = nilai aktivitas tertentu dalam unit wilayah tertentu
 t_1 = titik tahun akhir
 t_0 = titik tahun awal

Hirarki perkembangan wilayah didekati dengan metode skalogram. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi hirarki berupa perankingan yang dilakukan didasarkan pada tingkat kelengkapan fasilitas yang ada di suatu wilayah dan membandingkannya dengan wilayah lain (Saefulhakim, 2004). Rumus umum skalogram adalah seperti pada **Persamaan 4.**

$$\text{Indeks Hirarki } (I_1) = \sum_k^n (F_{ik} \cdot \frac{n}{ak}) \dots\dots(4)$$

dimana :
 $\frac{n}{ak}$ = bobot fasilitas penentu

Untuk menganalisis tingkat efisiensi wilayah pembangunan, digunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Analisis DEA dapat digunakan untuk melakukan analisis efisiensi dalam mengoptimasi kekuatan suatu sektor pembangunan (Vazhayil dan Balasubramaniam, 2013). Model matematis DEA seperti pada **Persamaan 5.**

$$\begin{aligned} & \text{Min } \theta \\ & \text{Subject to} \dots\dots\dots(5) \\ & n \\ & \sum_{j=1}^n x_{ij} \lambda_j \leq \theta x_{i0} \quad i = 1, 2, \dots, m ; \\ & n \\ & \sum_{j=1}^n y_{rj} \lambda_j \geq y_{r0} \quad r = 1, 2, \dots, s ; \\ & n \\ & \sum_{j=1}^n \lambda_j \geq 0 \quad i = 1, 2, \dots, n ; \end{aligned}$$

dimana:
 N = jumlah DMU
 m = jumlah *input*
 s = jumlah *output*
 x_{ij} = nilai *input* ke-I DMU j
 y_{rj} = nilai *output* ke-s DMU j
 λ_j = bobot DMU j untuk DMU yg dihitung

Arahan pembangunan dilakukan dengan menggunakan metode analisis MCDM-TOPSIS. Pendekatan *Multi-Criteria Decision-Making (MCDM)* digunakan ketika ada perbedaan pilihan-pilihan yang tidak dapat dievaluasi dengan pendugaan sederhana atau dengan satu dimensi (Postorino dan Pratico, 2012).

TOPSIS (*Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution*) menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan Jarak Euclidian (Zhang, 2011). Nilai bobot ternormalisasi (V_{ij}) dihitung dengan menggunakan **Persamaan 6.** Matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dirumuskan dengan **Persamaan 7.** Tingkat perkembangan ekonomi wilayah disajikan secara spasial melalui analisis peta dengan menggunakan *software* Sistem Informasi Geografis (SIG).

$$v_{ij} = w_i n_{ij} \text{ dengan } i=1,2,\dots,m; \text{ dan } j=1,2,\dots,n \dots\dots\dots(6)$$

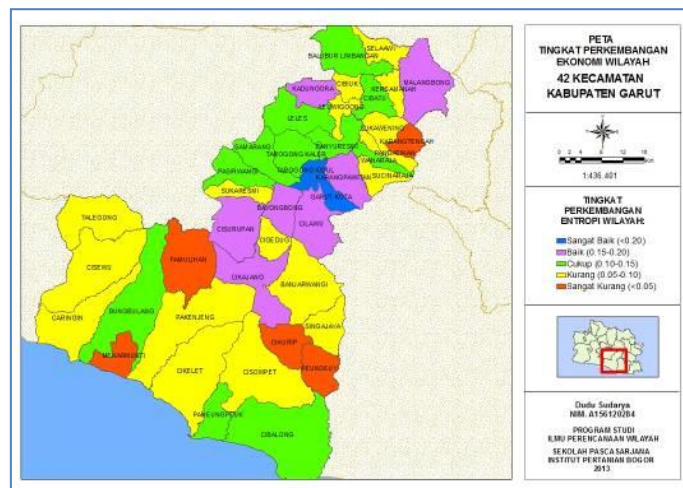
dimana:
 w_i = bobot dari atribut kriteria ke i dan $\sum_{i=1}^n w_i = 1$
 $A^+ = \{(v_1^+, v_2^+, \dots, v_n^+)\} = \{(\max v_{ij} | i \in I), (\min v_{ij} | i \in I)\}$
 $A^- = \{(v_1^-, v_2^-, \dots, v_n^-)\} = \{(\min v_{ij} | i \in I), (\max v_{ij} | i \in I)\} \dots\dots\dots(7)$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Ekonomi Wilayah

Dari hasil analisis entropi terhadap nilai PDRB tiap sektor, dapat diketahui bahwa tingkat keberagaman (diversitas) dan keberimbangan sektor-sektor ekonomi di Kecamatan Bungbulang, Pameungpeuk dan Cibalong cukup baik dibandingkan dengan Kecamatan Cikelet, Caringin dan Mekarmukti. Bila dibandingkan dengan nilai entropi rata-rata seluruh kecamatan di Kabupaten Garut, ternyata perkembangan ekonomi semua kecamatan di wilayah pesisir masih berada di bawah rata-rata. Nilai entropi rata-rata seluruh kecamatan sebesar 0,1141, sementara nilai entropi tertinggi di kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Bungbulang hanya 0,1111. Peta perkembangan ekonomi wilayah disajikan pada **Gambar 1.**

Ketimpangan perkembangan wilayah juga terjadi bila diperbandingkan antara tingkat perkembangan wilayah dengan total kemampuan maksimumnya. Berdasarkan analisis entropi perkembangan wilayah (Stot/Smaks), dapat diketahui bahwa nilai entropi kecamatan di wilayah pesisir hanya sebesar 0,7168. Itu berarti kecamatan di wilayah pesisir memiliki tingkat perkembangan sebesar 72% dari total kemampuan maksimumnya.



Gambar 1. Peta Tingkat Perkembangan Ekonomi Wilayah berdasarkan hasil analisis entropi.

Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Garut yang memiliki tingkat perkembangan sebesar 0,8074 atau sebesar 81% dari kemampuan maksimumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir memiliki perkembangan wilayah yang relatif tertinggal dibanding Kabupaten Garut sebagai induk wilayah sehingga perlu didorong agar ekonominya tumbuh lebih baik.

Keunggulan Komparatif Wilayah

Analisis keunggulan komparatif wilayah dilakukan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi basis dan non basis sebagai dasar bagi penetapan arahan dan strategi pembangunan kecamatan di wilayah pesisir. Menurut Tarigan (2004), sektor ekonomi basis adalah sektor yang merupakan kekuatan ekonomi suatu wilayah yang sudah mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri dan diekspor keluar wilayah.

Dari hasil analisis *Location Quotient (LQ)*, dapat diketahui bahwa kecamatan di wilayah pesisir umumnya masih mengandalkan basis ekonominya pada kelompok sektor primer seperti pertanian dan pertambangan/penggalian. Kelompok sektor sekunder seperti industri pengolahan, listrik dan air serta bangunan unggul di dua kecamatan yaitu Pakenjeng dan Cikelet.

Sektor basis di kelompok sektor tersier unggul di tiga kecamatan yaitu Kec. Pameungpeuk, Cikelet dan Cibalung, itupun terbatas hanya di sektor pengangkutan dan perdagangan. Secara kewilayahan, Kecamatan Caringin, Bungbulang dan Mekarmukti masih berciri kawasan perdesaan dimana sektor basisnya masih berada di sektor primer dalam bentuk pemanfaatan sumberdaya alam secara langsung. Sebaliknya, Kec. Pakenjeng, Cikelet, Pameungpeuk dan Cibalung sudah mulai mengalami transformasi mengarah kawasan perkotaan dimana sudah terjadi pergeseran sektor ekonomi ke sekunder dan tersier.

Keunggulan Kompetitif Wilayah

Analisis keunggulan kompetitif wilayah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pergeseran struktur ekonomi dari suatu sektor dibandingkan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dalam dua titik waktu. Pergeseran struktur ekonomi tersebut dapat menjelaskan kemampuan berkompetisi (*competitiveness*) dari suatu sektor ekonomi serta menjelaskan kinerja sektor tersebut.

Hasil analisis SSA menunjukkan bahwa struktur ekonomi kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir yang sudah mulai menunjukkan perkembangan. Hal ini bisa terlihat dari hasil analisis dimana pertumbuhan tiap sektor di wilayah pesisir mulai menunjukkan pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor primer rata-rata mengalami pertumbuhan yang lambat dengan nilai SSA antara 0,16-0,27. Sebaliknya sektor sekunder dan tersier mengalami pertumbuhan yang cukup cepat antara 0,30-0,63. Secara umum, sektor yang paling cepat tumbuh di kecamatan pesisir terjadi di sektor sekunder yaitu di sektor listrik, gas dan air minum serta sektor industri pengolahan. Untuk sektor tersier, yang paling cepat tumbuh secara umum terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa.

Hasil analisis keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memprioritaskan pembangunan sektor ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryawardana (2006) bahwa dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, pemerintah seharusnya mengarahkan pengeluaran anggaran pada sektor-sektor unggulan. Selain itu, investasi diharapkan agar diarahkan pada sektor unggulan sehingga akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

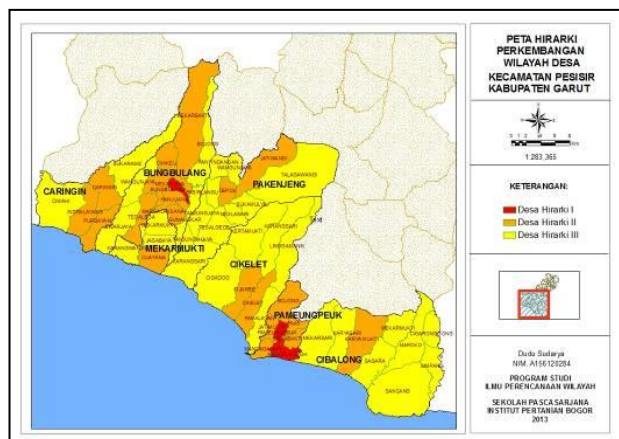
Hirarki Perkembangan Wilayah

Perkembangan suatu wilayah bisa dilihat salah satunya dari ketersediaan jumlah dan jenis sarana pelayanan di wilayah tersebut. Melalui pendekatan konsep wilayah nodal, dapat diketahui wilayah yang menjadi pusat-pusat (inti) dan wilayah yang menjadi pendukung atau *hinterland* (Saefulhakim, 2004). Dalam kaitannya dengan strategi pengembangan wilayah, perlu diidentifikasi wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan yang mampu menggerakkan ekonomi wilayah di sekitarnya.

Melalui pendekatan konsep wilayah nodal, dapat diketahui wilayah yang menjadi pusat-pusat (inti) dan wilayah yang menjadi pendukung (*hinterland*). Identifikasi terhadap wilayah inti dan *hinterland* penting dilakukan untuk menentukan prioritas wilayah pembangunan. Fokus pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan yang menjadi inti wilayah akan memudahkan dalam penetapan prioritas wilayah pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan pada wilayah inti diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya.

Dari hasil analisis skalogram terhadap jarak serta jumlah dan jenis fasilitas pelayanan, dapat diketahui bahwa sebagian besar perdesaan di kecamatan pesisir berada pada tingkat perkembangan yang rendah.

Dari 65 desa yang dianalisis, hanya ada 3 desa atau sekitar 4,6% yang masuk kategori Hirarki I. Desa yang masuk Hirarki II berjumlah 22 desa atau sekitar 33,9%. Sisanya sebanyak 40 desa atau sekitar 61,5% termasuk Hirarki III. Diantara 7 kecamatan, hanya ada dua kecamatan yang desa-desanya bisa dianggap cukup berkembang yaitu Keca. Pameungpeuk dan Bungbulang. Peta hirarki perkembangan desa disajikan pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Peta hirarki perkembangan wilayah desa di kecamatan pesisir Kabupaten Garut.

Efisiensi Wilayah Pembangunan

Selain dilihat dari ketersediaan fasilitas pelayanan, perencanaan pengembangan wilayah juga bisa didekati melalui analisis efisiensi wilayah.

Tujuannya adalah untuk menganalisis seberapa efisien pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lahan dalam mendorong pencapaian PDRB. Hal ini sejalan dengan pendapat Spurgeon (1999) bahwa ekonomi bisa didefinisikan sebagai "studi efisiensi alokasi sumberdaya".

Pemerintah menghadapi tantangan bagaimana memaksimalkan pendapatan ekonomi melalui penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki (tenaga kerja, modal dan sumberdaya alam). Berdasarkan hasil analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA), dapat diketahui bahwa dari sisi serapan tenaga kerja tiap sektor, terdapat empat kecamatan yang belum efisien yaitu Kecamatan Bungbulang, Mekarmukti, Pakenjeng dan Cikelet. Sementara dari sisi efisiensi pemanfaatan lahan, terdapat dua kecamatan yaitu Kecamatan Caringin dan Cikelet yang belum efisien. Untuk meningkatkan efisiensi wilayah, wilayah-wilayah yang tidak efisien harus merujuk (*peer*) pada pola pembangunan wilayah yang efisien.

Arahan Wilayah Pembangunan

Dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi wilayah pesisir, pembangunan harus dilakukan berdasarkan prinsip prioritas. Hal ini sejalan dengan pendapat Riyadi dan Bratakusumah (2005) bahwa perencanaan pembangunan wilayah dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, namun tetap berpegang pada asas prioritas. Arahan prioritas pembangunan wilayah kecamatan dilakukan berdasarkan pada hasil analisis perkembangan ekonomi, perkembangan sarana prasarana dan efisiensi wilayah.

Kriteria penetapan prioritas wilayah pembangunan tingkat kecamatan ditetapkan berdasarkan prinsip keberimbangan pembangunan dimana wilayah yang kurang berkembang perlu diprioritaskan untuk dibangun. Berdasarkan sintesis tersebut, ditetapkan tiga kriteria pemilihan prioritas wilayah yaitu: (1) wilayah yang memiliki diversitas dan keberimbangan ekonomi yang rendah, (2) wilayah yang memiliki perkembangan desa yang relatif lambat, dan (3) wilayah yang belum efisien dari sisi pemanfaatan sumberdaya.

Dari hasil analisis MCDM-TOPSIS, urutan prioritas wilayah pembangunan adalah: (1) Kecamatan Mekarmukti, (2) Kecamatan Pakenjeng (3) Kecamatan Caringin, (4) Kecamatan Cikelet, (5) Kecamatan Cibalong, (6) Kecamatan Bungbulang dan (7) Kecamatan Pameungpeuk. Peta prioritas

pembangunan kecamatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Garut disajikan pada **Gambar 3**.

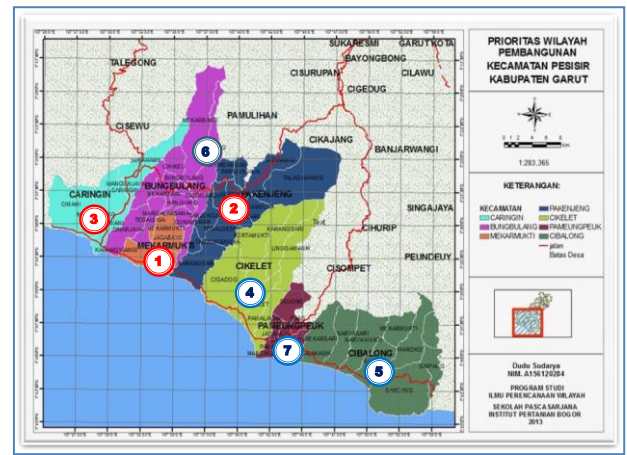
Arahan pembangunan untuk tingkat desa dilakukan berdasarkan pada tingkat hirarki perkembangan wilayah. Hal ini sejalan dengan pendapat Kronen, *et al.* (2010) bahwa strategi dan manajemen pembangunan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dan pemanfaatan sumberdaya membutuhkan pendekatan hirarki dan terintegrasi berdasarkan hasil identifikasi pada level wilayah lokal.

Berdasarkan teori tersebut, maka untuk mendorong peningkatan ekonomi wilayah, sasaran pembangunan desa harus didasarkan pada hirarki tingkat perkembangan masing-masing desa. Arahan pembangunan untuk tiap desa perlu disesuaikan dengan tingkat hirarki masing-masing.

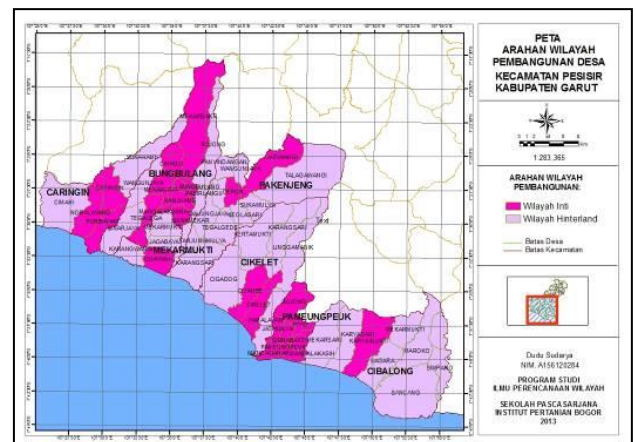
Pendekatan pembangunan untuk desa yang merupakan inti wilayah atau pusat pertumbuhan harus dibedakan dengan pendekatan pembangunan bagi desa-desa *hinterland*. Hal ini disebabkan karena wilayah inti cenderung memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah *hinterland*.

Melalui pendekatan konsep wilayah nodal, maka dapat ditetapkan prioritas pengembangan desa untuk masing-masing wilayah. Peta arahan pengembangan sarana prasarana desa disajikan pada **Gambar 4**. Kriteria bagi arahan pembangunan sarana prasarana desa adalah sebagai berikut:

- **Wilayah Inti** sebanyak 25 desa yang terdiri dari desa-desa Hirarki I dan Hirarki II yang perlu diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah dan jenis sarana dan prasarana pelayanan. Sasaran pembangunan terutama ditujukan untuk desa-desa Hirarki II yaitu desa-desa yang memiliki tingkat perkembangan sedang. Pembangunan perlu difokuskan pada desa-desa tersebut agar bisa berkembang menjadi wilayah Hirarki I yaitu wilayah inti atau pusat pertumbuhan yang mampu menggerakkan ekonomi wilayah-wilayah di sekitarnya.
- **Wilayah Pendukung (*hinterland*)** sebanyak 40 desa yang terdiri dari desa-desa Hirarki III. Wilayah ini merupakan wilayah desa yang berpotensi sebagai penyedia sumberdaya atau wilayah *hinterland* dimana fokus pembangunan lebih diprioritaskan pada pembangunan sumberdaya alam terutama di sektor primer seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan pertambangan/penggalian. Desa-desa tersebut perlu diperkuat dari sisi sarana prasarana produksi sebagai penyedia dan pemasok sumberdaya alam untuk mendukung perkembangan desa-desa di Kabupaten Garut, sehingga menjadi desa-desa Hirarki I maupun Hirarki II atau berkembang menjadi Wilayah Inti.



Gambar 3. Peta Prioritas Pengembangan Kecamatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Garut.



Gambar 4. Peta Arahan Wilayah Pengembangan Desa di Kecamatan Pesisir Kabupaten Garut.

Arahan Pengembangan Sektor Ekonomi

Dalam mendorong peningkatan ekonomi wilayah pesisir, perlu dilakukan pemilihan alternatif sektor ekonomi yang perlu diprioritaskan untuk dikembangkan. Pemilihan didasarkan pada hasil analisis dan persepsi *stakeholder*. Persepsi *stakeholder* menjadi bahan pertimbangan karena menurut pendapat Sharp, *et al.* (2002) bahwa dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, pembangunan perlu didasarkan pada pertimbangan aktif masyarakat, dukungan sektor swasta serta hubungan lebih baik antara masyarakat dan pemerintah.

Arahan prioritas pengembangan sektor ekonomi dilakukan dengan menetapkan 4 kriteria yaitu (1) sektor tersebut merupakan sektor yang unggul secara komparatif di banyak kecamatan, (2) sektor tersebut merupakan sektor unggul secara kompetitif di banyak kecamatan, (2) sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi, dan (4) sektor yang paling banyak dipilih berdasarkan persepsi *stakeholder*. Dengan menggunakan analisis MCDM-TOPSIS dapat diketahui bahwa

untuk meningkatkan perkembangan ekonomi wilayah di kecamatan pesisir, urutan prioritas pembangunan sektor ekonomi diarahkan pada (1) sektor pertanian, (2) industri pengolahan, (3) sektor perdagangan, hotel dan restoran, (4) sektor listrik, gas dan air minum.

KESIMPULAN

Tingkat perkembangan ekonomi kecamatan di wilayah pesisir relatif belum berkembang dimana tingkat keberagaman (diversitas) dan keberimbangan sektor-sektor ekonominya masih berada di bawah perkembangan rata-rata dengan tingkat perkembangannya sebesar 72% dari total kemampuan maksimumnya.

Dari sisi keunggulan komparatif wilayah, kecamatan pesisir secara umum memiliki basis ekonomi yang kuat di sektor primer. Dari sisi keunggulan kompetitif, sudah terjadi pergeseran struktur ekonomi dimana sektor sekunder memiliki tingkat pertumbuhan yang paling tinggi.

Sebagian besar perdesaan di kawasan pesisir berada pada tingkat perkembangan yang rendah. Dari 65 desa yang dianalisis, hanya ada 3 desa yang masuk kategori Hirarki I, sebanyak 22 desa masuk kategori Hirarki II dan 40 desa masuk kategori Hirarki III. Sejumlah kecamatan masih menunjukkan efisiensi yang rendah dari sisi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lahan.

Arahan wilayah pembangunan kecamatan adalah: (1) Kecamatan Mekarmukti, (2) Kecamatan Pakenjeng, dan (3) Kecamatan Caringin. Arahan pembangunan wilayah desa adalah sebanyak 25 desa diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan fasilitas pelayanan dan 40 desa diarahkan sebagai pemasok sumberdaya melalui peningkatan sumberdaya manusia, sarana produksi dan efisiensi pemanfaatan lahan. Arahan pembangunan sektor ekonomi diprioritaskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor listrik, gas dan air minum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bupati Garut yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini. Tak lupa diucapkan terima kasih juga kepada Dekan Fak. Pertanian dan Fak. Ekonomi Manajemen IPB yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, J.T. (2012). US Rural Economic Competitiveness by The Numbers: Data Mining, Analysis, and Web-Mapping. *Applied Geography*. 44: 403-412.
- Gumilar, F. (2009). *Kajian Disparitas Pembangunan Antar Wilayah Sebagai Arahan Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Garut*. Tesis. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kronen, M., A. Vunisea, F. Magron and B. McArdle. (2010). Socio-Economic Drivers and Indicators For Coastal Fisheries In Pacific Island Countries And Their Use For Fisheries Management Strategies. *Marine Policy*. 34:1135-1143.
- Morrissey, K. and C. O'Donoghue. (2012). The Irish Marine Economy and Regional Development. *Marine Policy*. 36: 358-364.
- Panuju, D.R. dan E. Rustiadi (2012). *Teknik Analisis Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Bagian Perencanaan Pengembangan Wilayah. Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Perda No. 29 Tahun 2011 tentang *Wilayah Pesisir Kabupaten Garut ditetapkan sebagai Kawasan Strategi Kabupaten (KSK)*.
- Postorino, M.N. and F.G. Pratico. (2012). An Application of Multi-Criteria Decision-Making Analysis to a Regional Multi-Airport System. *Research In Transportation Business & Management*. 4: 44-52.
- Riyadi dan D. Bratakusumah. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rustiadi, E. (2003). *Pengembangan Wilayah Pesisir sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Daerah*. Makalah Pelatihan Pengelolaan dan Perencanaan Wilayah Pesisir secara Berkelanjutan. Kerjasama PKSPL IPB dengan Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Bogor.
- Saefulhakim, S. (2004). *Pemodelan Analisis Kuantitatif Sosial Ekonomi Spasial*. Program Studi Perencanaan Wilayah. Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor.
- Sharp, J.S., K. Agnitsch, V. Ryan and J. Flora. (2002). Social Infrastructure and Community Economic Development strategies: The Case of Self-Development and Industrial Recruitment in Rural Iowa. *Rural Studies*. 18: 405-417.
- Spurgeon, J. (1999). The Socio-Economic Cost and Benefits of Coastal Habitat Rehabilitation and Creation. *Marine Pollution Bulletin* 37 (8-12): 373-382. Elsevier Science Limited.
- Suryawardana, M.I. (2006). *Analisis Keterkaitan Sektor Unggulan dan Alokasi Anggaran untuk Penguatan Kinerja Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur*. Tesis. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Tarigan, H.S.R. (2004). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Vazhayil, J.P. and R. Balasubramaniam. (2013). Optimization of India's Power Sector Strategies using Weight-Restricted Stochastic Data Envelopment Analysis. *Energy Policy*. 56: 456-465.
- Zhang, H. (2011). The Evaluation of Tourism Destination Competitiveness by TOPSIS & Information Entropy – A Case in The Yangtze River Delta of China. *Tourism Management*. 32(2): 443-451.